

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Anies Pastikan E-Budgeting Sudah Diperbaharui

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memperbarui sistem *e-budgeting* menyusul beberapa pengajuan anggaran di draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang dinilai janggal.

Prinsipnya, pembaruan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan sistem yang cerdas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, dengan pembaruan (*update*) sistem tersebut, anggaran DKI tidak saja dapat diakses oleh publik, namun juga menyediakan ruang komentar. Publik dapat langsung memberikan respons di sistem tersebut.

"Kalaupun publik itu hanya bisa lihat, tapi tidak bisa memberikan komentar. Nah, itu (pembaruan) sudah dikerjakan dan akan digunakan mulai Januari 2020," kata Anies.

Menurut Anies, sistem *e-budgeting* memang tak lagi cerdas (*smart*) sehingga harus dibenahi. Ibaratnya aplikasi yang selalu mengalami perkembangan. Karena itu, perbaikan dalam sistem *e-budgeting* menjadi hal yang lumrah. "Jadi bukan mengganti, tapi *upgrading*. Meng-*upgrade*, kalau mengganti kesannya seperti meniadakan sama sekali. Jadi *upgrade* saja sehingga sistemnya *smarter and smarter and smarter*," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.

Anies menyebutkan, pembaruan sistem *e-budgeting* bukan karena heboh setelah adanya anggaran janggal. Sebaliknya, pembaruan sudah dilakukan sejak awal tahun. "Inisudah kami kerjakan dari awal tahun, artinya bukan karena ada keramaian," ujarnya.

Bagi Anies pembaruan sistem tersebut perlu, salah satunya untuk mencegah dampak *human error*. Karena kekeliruan dalam memasukan data masih mungkin terjadi. "Proyeksi per-

baikan sistem *e-budgeting* akan menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual," ungkapnya.

Warisan Gubernur Sebelumnya

Seperti diketahui, sistem *e-budgeting* mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, misalnya, anggaran penghapusan papantulis buat 601.813 orang selama 12 bulan sebesar Rp53 miliar.

Kemudian anggaran belanja makan dan minum harian pegawai untuk 601.813 orang selama 12 bulan hanya Rp6.000 per orang per bulan dengan biaya total Rp43,3 miliar. Selanjutnya anggaran transpor peserta didik lomba untuk 601.813 orang selama 12 bulan, tapi hanya dianggarkan Rp6.000 per bulan dengan biaya total Rp43 miliar. Itu membuktikan bahwa praktik *dummy* anggaran sudah sejak lama dan berjalan setiap tahun. Bahkan, dalam perjalanannya anggaran tersebut lolos dan tidak ada menjadi perbincangan publik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendukung langkah Gubernur Anies memperbarui sistem *e-budgeting* yang diterapkan sejak mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal yang harus dicatat, sistem *e-budgeting* untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

yang baru nantinya harus lebih baik dan transparan dibandingkan sistem saat ini. "Yang sudah baik harus terus diperbaiki. Itulah sistem, jangan diubah," ungkapnya.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta selama ini selalu disisir satu per satu oleh DPRD DKI Jakarta. Dia memastikan anggaran yang janggal akan dicoret. Begitu pun dengan usulan yang janggal dalam rancangan kebijakan umum KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Penyisiran anggaran dilakukan dua kali, saat pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD. "Kami selalu temui kegiatan janggal setiap pembahasan anggaran. Kami coret kalau janggal," jamininya.

Secara Etika Salah Teriak ke Publik

Anggota Fraksi PSI pada DPRD DKI William Aditya Sarana adalah orang pertama yang buka suara soal kejanggalan rencana anggaran DKI Jakarta 2020. Temuan itu kemudian menjadi viral di media sosial. Salah satu yang menjadi sorotan PSI adalah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta yang menyiapkan dana pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengungkapkan, William sebagai salah satu anggota DPRD seharusnya ikut membereskan kejanggalan anggaran tersebut. Bukannya melempar kejanggalan tersebut ke publik hingga timbul ketidakpercayaan masyarakat. "Mereka

(DPRD) yang *ribet* nih, teriak-teriak. Jadi betul, ketika suatu hal masih dalam perbincangan, langsung dilepas ke publik. Memang secara etika itu juga salah menurut saya," katanya.

William telah mendapat teguran dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Inggard Joshua karena mengunggah rencana anggaran lem Aibon Rp82,8 miliar ke media sosialnya. Adrianus menyebut bahwa teguran dari pimpinan komisi tersebut merupakan hal wajar. "Jadi, kalau dilihat pendekatan etika lembaga, saya kira wajar kalau Ketua DPRD-nya menegur si PSI secara etika kelembagaan," nilainya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik anggotanya, William Aditya Sarana, di sela-sela rapat untuk APBD 2020. Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritik rancangan anggaran yang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi. Bahkan Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasi. "Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita bahas," ucapnya.

Jika ingin mengkritik usulan anggaran yang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William agar mengemukakannya di dalam rapat anggaran dengan eksekutif. "Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat, dan kita bahas nanti," ujarnya.

Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota Dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata krama dalam

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Anies Pastikan E-Budgeting Sudah Diperbaharui

menyampaikan pendapat di muka umum. "Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh *ngomong* di koran atau televisi. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," katanya.

Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus bersinergi. Artinya, bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antarinstansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh. "Eksekutif itu mitranya, kalau perlu kita *ngomong* di dalam. Jadi, enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya.

● bima setiyadi

SPIRIT BUDGETING TRANSPARAN

Pemprov DKI Jakarta akan mempertahankan asas transparansi dan akuntabel dalam pembenahan sistem *e-budgeting*. Sistem ini adalah alat pencegahan korupsi yang baik karena bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.



Sumber Pemprov DKI Jakarta



Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Anies Pastikan E-Budgeting Sudah Diperbaharui

FOKUS PEMBINAAN

- Pembinaan kemampuan mengidentifikasi anggaran menyimpang sebab sistem *e-budgeting* yang diwariskan tidak bisa melakukan hal itu karena ada kebebasan dalam penyusunannya.
- Proyeksi perbaikan sistem *e-budgeting* menitikberatkan pada kemampuan melakukan verifikasi secara otomatis, dan tak lagi mengandalkan proses manual.

- Meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran. Sistem ini diterapkan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengecekan harga.
- Dari segi konteks, dengan transformasi digital pelayanan publik dapat mengandalkan data yang diperoleh untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan masyarakat. Sehingga diharapkan mampu memberikan layanan yang efektif.
- Layanan kontekstual tidak mampu terwujud tanpa adanya keterbukaan data. Data yang terkoordinasi membuat layanan yang efektif dapat terwujud.